

EVALUASI SISTEM PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN

Nurdiyanto Yusuf

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, nurdiyanto.yusuf@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

Corporate governance in the world of economics is something that is considered as important as what happened in the state government. This study examines how the principles of Good Corporate Governance relate to credit granting procedures in banking institutions at PT. State Savings Bank (Persero) Tbk. This research is case study research conducted at a private company engaged in the banking sector in Indonesia. The aim of this research is to determine the relationship between the application of the principles of corporate governance (GCG) to credit granting procedures within the company. Corporate Governance as a set of rules that determines the relationship between shareholders, management, creditors, government, employees, and other internal and external stakeholders with respect to their rights and obligations, or in other words a system that directs and controls the company. Where there are five principles of Good Corporate Governance, namely: a) Information transparency, b) Accountability, c) Responsibility, d) Independence, e) Fairness. Data collection methods used in this research are interviews and analysis of company documents. The results of this study indicate that there is an important role between GCG implementation and credit granting procedures. The results of this study encourage and motivate companies so that GCG principles are used as a corporate culture.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Bank Tabungan Negara

ABSTRAK

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Penelitian ini meneliti bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap prosedur pemberian kredit di lembaga perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penerapan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit dalam perusahaan. Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimana terdapat lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance yakni: a) Keterbukaan informasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara penerapan GCG terhadap prosedur pemberian kredit. Hasil penelitian ini mendorong dan memotivasi perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai budaya perusahaan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Tabungan Negara

1. PENDAHULUAN

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, WorldCom, Maxwell, Polytec dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu good corporate governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik curang (fraud) dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Implementasi good corporate governance (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan

dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Adapun prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara dimulai dari permohonan kredit, yaitu calon debitur melakukan permohonan kredit dengan mengisi formulir aplikasi kemudian pihak bank melakukan analisis dan evaluasi terhadap resiko kredit yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap nasabah selanjutnya setelah melakukan analisis kredit maka pejabat bank melakukan negosiasi kredit dengan pemohon untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah, struktur, dan tipe kredit, kelengkapan dokumen serta syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi pemohon dan kemudian memberikan putusan kredit apakah nasabah telah memenuhi semua syarat-syarat dan layak untuk mendapatkan kredit lalu dana kredit di cairkan atau diberikan ke pada nasabah setelah semua prosedur dipenuhi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Good Corporate Governance

Governance di ambil dari kata latin, gubernance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance yang sebagai upaya mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan: (1) agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, (2) untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder' value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk (Wahyudin, 2008).

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari beberapa perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara obyektif dan bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BTN (persero), Tbk Cabang Bekasi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.19, Bekasi Barat (www.btn.co.id).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data ini diperoleh dari wawancara langsung ke PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah. Buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah dalam penulisan ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan subjek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara.

3.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif maka dari itu penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis secara kualitatif yaitu :

1. Menranskrip data yang masih mentah dari wawancara terstruktur.
2. Hasil dari penelitian berupa data kemudian disorting (mengolah informasi yang diperoleh sehingga sistematis berdasarkan variabel yang diteliti) dengan cara mereduksi data yang diperoleh. Proses reduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.
3. Sedangkan untuk menganalisis data dipakai content analysis (teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis).
4. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan. Isi kesimpulan tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang di peroleh penulis diperoleh informasi BTN memiliki komitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) sebagai salah satu persyaratan utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha dan BTN menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Bank BTN juga memiliki beberapa komite yang menunjang berjalannya operasional perusahaan yaitu Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Audit. tugas pokok komite-komite yang mengawasi dan menunjang operasional perusahaan dan prosedur pemberian kredit di Bank BTN.

4.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BTN

Dari hasil wawancara maka penulis memperoleh informasi mengenai prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di Bank BTN yang antara lain :

- a. Keterbukaan (Transparency)
 1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
 2. Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Akuntabilitas (Accountability)
 1. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi bank serta menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
 2. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki reward and punishment system.
 3. Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.
 - c. Tanggung Jawab (Responsibility)
 1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social secara wajar.
 - d. Independensi (Independency)
 1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
 2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
-

e. Kewajaran (fairness)

1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan berbagai program pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai salah satu bank umum dalam hal ini telah merespon keinginan para nasabahnya yakni bukan saja bank yang hanya mengumpulkan dana dan menerima simpanan masyarakat dalam tabungan, deposito dan giro tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

Memperhatikan peranan perbankan yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan nasional dan sebagai intermediasi dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta dilihat dari sumber pendapatan utama bank, dimana sumber pendapatan utamanya adalah dari pemberian kredit, dengan demikian dalam pemberian kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan prosedur perkreditan yang sehat untuk menghindari masalah yang akan timbul, dikarenakan banyak sekali terjadi kredit bermasalah di dunia perbankan antara lain kredit kurang lancar atau kredit macet.

Kredit macet adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atas kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan banyak bank di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta menerapkan aturan kredit tersendiri, peraturan yang berlaku dalam menyalurkan dana atas pinjaman berupa kredit kepada debiturnya. Semua ini dilakukan pihak bank untuk mengamankan bisnis bank tersebut dari bahaya kredit macet. Apabila ada kredit macet, tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang di tempuh:

1. Jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitur dengan memperingan syarat – syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih feasible.

2. Jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui mengajukan gugatan ke pengadilan.

4.3 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk

Sistem pemberian kredit yang terdiri atas beberapa prosedur secara hierarki dan terstruktur, dimana setiap prosedur terdiri atas langkah-langkah yang konkrit sebagai wujud nyata dari sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan produk

Pihak bank mengenalkan macam-macam produk kredit yang dimiliki oleh pihak bank kepada calon debitur agar calon debitur dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan produk yang ditawarkan untuk dijadikan dasar memilih produk kredit yang akan diambil sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

b. Penjelasan syarat dan ketentuan pengajuan kredit

Dalam mengajukan Kredit Agunan Rumah (KAR), sebelumnya nasabah harus mengetahui mengenai syarat dan ketentuan pengajuan Kredit Agunan Rumah (KAR) terlebih dahulu. Syarat dan ketentuan akan dijelaskan loan service.

c. BI cheking

Pengecekan pinjaman calon debitur pada bank lain dan kemampuan calon debitur mengangsur (mampu atau tidak mengangsur) pinjaman yang ada pada 2 tahun terakhir. Apabila calon debitur memenuhi syarat maka permohonan kredit dikabulkan. Apabila tidak bisa mengangsur maka permohonan kredit ditolak dengan memberikan surat penolakan kepada calon debitur.

d. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk

segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

e. Wawancara

Tujuan wawancara kredit yaitu untuk mencocokkan dokumen yang telah diterima oleh bank. Dalam melakukan wawancara bank mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabahnya. Hal - hal yang perlu dipertanyakan dalam wawancara adalah data - data pemohon, data – data pekerjaan dan pengeluaran atau biaya hidup. Pada tahap wawancara juga akan dijelaskan mengenai lebih lanjut mengenai ketentuan pengajuan Kredit Agunan Rumah (KAR).

f. DUP (Daftar Usulan Pemohon) dan OTS (On The Spot)

DUP atau Daftar usulan Pemohon adalah daftar berkas kelengkapan mengenai calon debitur dan hasil wawancara yang telah dilakukan. DUP langsung bisa dibuat untuk calon debitur yang berpenghasilan tetap.

OTS (On The Spot) adalah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot sebaiknya nasabah tidak diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan pada saat OTS dikenakan biaya appraisal untuk mengecek harga rumah Rp 1.000.000.

g. Analisa Pemohon

Tahap selanjutnya adalah bank melakukan analisa oleh loan service terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah dengan melakukan analisis kredit. Analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank merupakan bagian dari tahap proses pemberian kredit. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui calon nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit serta sebagai bahan rekomendasi dalam pemutusan kredit.

h. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

4.4 Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

Dari prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara yang telah dijelaskan di atas, Bank BTN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap jenjang prosedur yang di butuhkan dalam pemberian kredit yang antara lain:

Tabel 4.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

No	Keterangan	Unsur-Unsur	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pertanggungjawaban (Responsibility)	a. Mengembangkan system akuntansi berdasarkan standar akuntansi.	√	
		b. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan.	√	
		c. Mengembangkan teknologi informasi.	√	
		d. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material.	√	
2.	Akuntabilitas (Accountability)	a. Terdapat pembagian tugas (<i>job desk</i>) yang jelas.	√	

No	Keterangan	Unsur-Unsur	Sesuai	Tidak Sesuai
		b. Menetapkan penilaian kerja.	√	
3.	Transparansi (<i>Transparency</i>)	a. Mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam setiap program dan prosedur.	√	
		b. Membuat peraturan - peraturan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan.	√	
		c. Mengedepankan profesionalisme dan pematuhan etika perusahaan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.	√	
		d. Berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan terpercaya.	√	
4.	Kewajaran (<i>Fairness</i>)	a. Menetapkan aturan perusahaan.	√	
		b. Membuat kebijakan untuk memproteksi perusahaan dari kesalahan - kesalahan yang biasa timbul dari dalam perusahaan.	√	
		c. Setiap informasi sudah diungkapkan dan dipublikasikan secara wajar.	√	
5.	Kemandirian (<i>Independency</i>)	a. Dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh dan kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu.	√	
		b. Menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara professional dan independen.	√	
		c. Tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat.	√	
		d. Menghindari benturan kepentingan.	√	
		e. Memiliki peraturan tentang benturan kepentingan.	√	

4.5 Hasil Rangkuman

1. Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk aspek pertanggungjawaban dinyatakan sudah SESUAI.
2. Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk aspek akuntabilitas dinyatakan sudah SESUAI.
3. Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk aspek transparansi SESUAI.
4. Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk aspek kewajaran dinyatakan sudah SESUAI.
5. Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk aspek dinyatakan sudah SESUAI.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan karena dari kelima aspek prosedur pemberian kredit yaitu pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kemandirian telah dinyatakan SESUAI.

5.2 Saran

Hasil dari wawancara, narasi dalam annual report dan gambar dapat salah interpretasi karena data dan fakta yang di analisis ada yang tanpa pengesahaan dari pihak ketiga yang tidak memihak/netral. Meskipun demikian, hal-hal di atas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun pendekatannya atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas dari bias subjektifitas. Akhirnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak bank dan dengan berbagai model, baik konvensional maupun syariah. Serta waktu yang digunakan dalam meneliti hendaknya lebih panjang, karena semakin lama waktunya maka data yang didapat akan semakin lengkap dan validitasnya lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Bank Indonesia, 2004, Booklet Perbankan Indonesia, Direktorat Perizinan dan Informasi Pebankan.
- [2]. Bank, World, 2005, Corporate Governance Country Assessment: Republic of Indonesia, Jakarta.
- [3]. Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta:Salemba Empat.
- [4]. Kasmir, 2012, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- [5]. Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- [6]. Moh, Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung.
- [7]. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Indonesia.
- [8]. Sastradipoera, komaruddin, 2004, Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing, Penerbit Kappa Sigma:Bandung.
- [9]. Thamrin Abdullah, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan , PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- [10]. Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta:Bandung.